

**DR. ULUNG PRIBADI**



INTERVENSI PUSAT DALAM KEBIJAKAN PENATAAN ULANG

# **KELEMBAGAAN PELAYANAN PERIZINAN PEMDA:**

PERSPEKTIF PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI

## KATA PENGANTAR

*Intervensi Pisat dalam Kebijakan Penataan Ulang Kelembagaan Perizinan Pemda: Perspektif Perubahan Struktur Organisasi*

Penulis : Dr. Ulung Pribadi  
Desain : Djoko Supriyanto

foto sampul depan: bp2t.tangerangseltankota.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Desember 2015

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Ungkar Selatan Bantul Yogyakarta.

Telp: 0274-387656 pesawat 159

Kebijakan Penataan Ulang Kelembagaan Pelayanan Perizinan Pemda / Ulung Pribadi, \_\_\_\_\_ Yogyakarta

LP3M UMY Yogyakarta

304 hlm; 15 x 21 cm.

ISBN 978-602-7577-57-2



Janet V. Denhardt and Robert B. Denhardt, ahli organisasi publik, dalam *The New Public Service* (2003:29), menegaskan tentang apa yang disebut sebagai kepentingan publik: “public interest is the result of a dialogue about shared values.” Jadi, kepentingan atau kebutuhan publik bukanlah kepentingan atau kebutuhan yang diinterpretasikan sendirian oleh penguasa yang kemudian dianggap sebagai kepentingan atau kebutuhan rakyat. Kepentingan atau kebutuhan rakyat betul-betul sebagai buah dari hasil dialog *stakeholders* masyarakat. Maka, menurut Denhardt and Denhardt, tugas *public servants* adalah to serve citizens, not customers (serving, negotiating and brokering interests among citizens and community groups, creating shared values). Sehingga, menurut mereka, struktur organisasi yang dibentuk mestilah struktur organisasi yang bersifat kolaboratif yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam unit-unit organisasi pemerintah. (*collaborative structures with leadership shared internally and externally*).

Henry Mintzberg, dalam *The Structuring of Organizations: a Synthesis of the Research* (1979:104-5), menyodorkan mekanisme pembentukan struktur organisasi secara “bottom-up procedure.” Menurutnya, prosedur itu adalah:

“... from specific tasks to the over-all hierarchy. The designer then combines



# KATA PENGANTAR

*Intervensi Pusat dalam Kebijakan Penataan Ulang  
Kelembagaan Perizinan Pemda: Perspektif Perubahan Struktur  
Organisasi*

Penulis : Dr. Ulung Pribadi  
Desain : Djoko Supriyanto

foto sampul depan: bp2t.litangerangsela.nkota.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Desember 2015

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat (LP3M) Uni-  
versitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan Bantul Yogyakarta.

Telp: 0274-387656 pesawat 159

Kebijakan Penataan Ulang Kelembagaan Pelayanan Perizinan Pemda / Ulung Pribadi,  
Yogyakarta

LP3M UMY Yogyakarta

304 hlm; 15 x 21 cm.

ISBN 978-602-7577-57-2



Janet V. Denhardt and Robert B. Denhardt, ahli organisasi publik, dalam *The New Public Service* (2003:29), menegaskan tentang apa yang disebut sebagai kepentingan publik: "public interest is the result of a dialogue about shared values." Jadi, kepentingan atau kebutuhan publik bukanlah kepentingan atau kebutuhan yang diinterpretasikan sendiri oleh penguasa yang kemudian dianggap sebagai kepentingan atau kebutuhan rakyat. Kepentingan atau kebutuhan rakyat betul-betul sebagai buah dari hasil dialog *stakeholders* masyarakat. Maka, menurut Denhardt and Denhardt, tugas *public servants* adalah to serve citizens, not customers (serving: negotiating and brokering interests among citizens and community groups, creating shared values). Sehingga, menurut mereka, struktur organisasi yang dibentuk mestilah struktur organisasi yang bersifat kolaboratif yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam unit-unit organisasi pemerintahan. (collaborative structures with leadership shared internally and externally).

Henry Mintzberg, dalam *The Structuring of Organizations: a Synthesis of the Research* (1979:104-5), menyodorkan mekanisme pembentukan struktur organisasi secara "bottom-up procedure." Menurutnya, prosedur itu adalah:

"... from specific tasks to the overall hierarchy. The designer then combines



# KATA PENGANTAR

*Intervensi Pusat dalam Kebijakan Penataan Ulang  
Kelembagaan Perizinan Pemda: Perspektif Perubahan Struktur  
Organisasi*

Penulis : Dr. Ulung Priyadi  
Desain : Djoko Supriyanto

foto sampul depan: bp2t.litangerangsela.nkota.go.id

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Desember 2015

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Publikasi & Pengabdian Masyarakat (LP3M) Uni-  
versitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan Bantul Yogyakarta.

Telp: 0274-387656 pesawat 159

Kebijakan Penataan Ulang Kelembagaan Pelayanan Perizinan Pemda / Ulung Priyadi,  
Yogyakarta

LP3M UMY Yogyakarta

304 hlm; 15 x 21 cm.

ISBN 978-602-7577-57-2



Janet V. Denhardt and Robert B. Denhardt, ahli organisasi publik, dalam *The New Public Service* (2003:29), menegaskan tentang apa yang disebut sebagai kepentingan publik: "public interest is the result of a dialogue about shared values." Jadi, kepentingan atau kebutuhan publik bukanlah kepentingan atau kebutuhan yang diinterpretasikan sendiri oleh penguasa yang kemudian dianggap sebagai kepentingan atau kebutuhan rakyat. Kepentingan atau kebutuhan rakyat betul-betul sebagai buah dari hasil dialog *stakeholders* masyarakat. Maka, menurut Denhardt and Denhardt, tugas *public servants* adalah to serve citizens, not customers (serving: negotiating and brokering interests among citizens and community groups, creating shared values). Sehingga, menurut mereka, struktur organisasi yang dibentuk mestilah struktur organisasi yang bersifat kolaboratif yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam unit-unit organisasi pemerintahan. (collaborative structures with leadership shared internally and externally).

Henry Mintzberg, dalam *The Structuring of Organizations: a Synthesis of the Research* (1979:104-5), menyodorkan mekanisme pembentukan struktur organisasi secara "bottom-up procedure." Menurutnya, prosedur itu adalah:

"... from specific tasks to the overall hierarchy. The designer then combines